

KONTRIBUSI PERSATUAN ISLAM DALAM DINAMIKA KEBANGSASAN DI INDONESIA

Oleh: Prof. Dudung Abdurahman
(Guru Besar Sejarah Islam UIN Sunan Kalijaga)

PENGANTAR REDAKSI

Sebagai sebuah objek kajian akademik, Persatuan Islam (Persis) saat ini relatif tidak menarik bagi para akademisi di perguruan tinggi, khususnya para akademisi non-warga Persis. **Prof. Dudung Abdurahman** (lahir di Ciamis, 6 Maret 1963) merupakan salah satu akademisi non-warga Persis yang belakangan memberikan perhatian pada terhadap Persis sebagai sebuah kajian akademik, khususnya dalam perspektif sejarah. Namun, sebagaimana yang diakui oleh beliau, perhatian Prof. Dudung terhadap Persis bahkan sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu, yang terwujud dalam bentuk skripsi beliau tentang Persis yang ditulis pada tahun 1988, ketika beliau menyelesaikan program sarjana pada Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (dulu IAIN Sunan Kalijaga). Pada tahun 2019, Prof. Dudung menulis sebuah bab berjudul “A. Hassan, Guru Utama Persatuan Islam” dalam buku berjudul *Tokoh-Tokoh Muslim Indonesia Kontemporer* (Idea Press, 2019). Pada tahun 2020, beliau menulis sebuah bab berjudul “Dinamika Kontemporer Persatuan Islam, 1945-2015” dalam sebuah buku antologi berjudul *Gerakan-Gerakan Islam Indonesia Kontemporer* (Adab Press, 2020). Dan pada Nopember 2021 silam, pihak PP Persis mengundang khusus Prof. Dudung untuk menyampaikan presentasinya terkait Persis dalam ke-

giatan sosialisasi yang diselenggarakan atas kerja sama PP Persis dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Artikel ini adalah materi yang disampaikan Prof. Dudung dalam acara tersebut. Sebagaimana yang juga diakui beliau, temuan dan pembahasan dalam tulisan-tulisan beliau sesungguhnya tidak memberikan hal yang baru dalam khazanah kajian tentang Persis. Beliau juga menyatakan bahwa tulisan-tulisan beliau lebih banyak mengacu pada sumber-sumber yang ditemukan oleh para pengakji Persis insider, seperti Pepen Irpan Fauzan dan Tiar Anwar Bachtiar. Pemuatan artikel ini merupakan bentuk apresiasi keluarga besar Persis terhadap perhatian akademik Prof. Dudung atas Persis.

Karakteristik utama gerakan Persis adalah bergerak di bidang sosial-keagamaan, terutama puritanisasi Islam di Indonesia. Namun berdasarkan kiprah dan pemikiran para tokoh ataupun atas nama organisasi ini, sumbangsih Persis dalam pergerakan nasional tidak dapat dipandang sebelah mata. Semenjak masa kolonial hingga periode kemerdekaan Indonesia dewasa ini, Persis menunjukkan kontribusi dalam percaturan politik Indonesia maupun pembinaan kebangsaan.

KIPRAH SOSIAL-POLITIK

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, kalangan Persis berperan aktif dalam usaha-usaha politik umat Islam bersama-sama dengan golongan nasionalis beserta ide-ide politiknya (Noer, 1987). Dalam masalah kenegaraan, Persis ikut dalam perdebatan ketika Soekarno menawarkan ide tentang pemisahan agama dari negara seperti yang dilakukan Kemal Attaturk di Turki. Namun, bagi Soekarno, pemisahan agama dari negara secara formal, tidaklah berarti menjauhkan sama sekali urusan-urusan keagamaan (Islam) dari kehidupan warga negara. Rakyat tetap dapat memasukkan ajaran-ajaran Islam itu dalam



Prof. Dudung Abdurrahman. (Gambar: republika.id)

sikap dan kebijaksanaan politik melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian pula dengan gagasan Soekarno yang mengharapkan adanya proses sosialisasi nilai-nilai Islam. Pemeluk Islam sendiri dapat menyadari sepenuhnya arti ajaran-ajarannya, maka negara atau masyarakat dengan serta merta akan memihak kepada Islam (Soekarno, 1965).

Sementara itu, pandangan umum kalangan Persis terhadap gagasan Soekarno tersebut, meski melalui perdebatan di kalangan Persis sendiri, menyatakan bahwa perjuangan untuk merealisasikan nilai-nilai Islam justru menuntut adanya konsolidasi bagi pe-

laksanaan syariat agama dengan langkah-langkah aktif dalam politik praktis. Karena itu, sejak terbentuknya Partai Masyumi dalam Kongres Umat Islam pada 7-8 Nopember 1945 di Yogyakarta, tokoh-tokoh Persis mulai berkiprah dalam partai politik umat Islam Indonesia tersebut.

Kiprah politik Persis pada awal kemerdekaan bisa dikatakan identik dengan politik Masyumi. Karena sejak Persis berdiri kembali secara resmi pada tahun 1948, organisasi ini merupakan anggota istimewa partai Masyumi, dan seluruh anggota Persis dianjurkan memasuki partai ini. Dua tokoh Persis, Mohammad Natsir dan Isa Anshary, juga terpilih sebagai anggota pimpinan Masyumi Pusat (Mughni, 1980). Semangat serta usaha Persis untuk berkiprah dalam politik praktis juga ditegaskan dalam buku "Manifes Perjuangan Persis" (1956); bahwa "Persis semenjak berdirinya bersemboyan hendak mengembalikan umat Islam kepada pimpinan Alquran dan Sunnah, maka usaha-usaha yang dilakukan organisasi ini bukan saja terbatas dalam dakwah bidang aqidah dan ibadah saja, melainkan juga berjuang dalam politik serta ideologi Islam (Anshary, 1958).

Selanjutnya, Persis mendukung kepemimpin Republik Indonesia di tangan nasionalis sekuler, khususnya Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini ditegaskan oleh Isa Anshary, bahwa partisipasi umat Islam dalam perjuangan kemerdekaan itu semata-mata untuk "membangun negara dalam keridlaan Allah dan memenuhi tanggung jawab sebagai umat Islam" (Anshary, 1954). Semangat perjuangan politik Persis dikembangkan lebih lanjut melalui Dewan Konstituante sejak dibentuk pada 1956. Mereka memandang Dewan Konstituante merupakan

sarana untuk memperjuangkan prinsip-prinsip Islam melalui demokrasi dalam negara Republik Indonesia (Federspiel, 1970).

Kiprah politik lainnya yang ditampilkkan kalangan Persis pada masa Orde Lama adalah reaksi mereka terhadap komunisme dan gerakan politiknya. Dalam manifesto politik yang dikeluarkan Pusat Pimpinan Persis pada tanggal 4 Maret 1957, dinyatakan bahwa teori dan praktek komunisme bukan saja bertentangan dengan semua agama, tetapi komunisme juga mengandung permusuhan dan pertentangan dengan keyakinan yang diajarkan oleh semua agama. Sikap tegas Persis terhadap komunisme tersebut juga diarahkan kepada pengikutnya. Perlawanan terhadap komunisme, antara lain dilakukan Pemuda Persis, yang berupaya menghadapi dan membendung komunisme di Indonesia dengan mengerahkan para mualig muda dalam berbagai kegiatan dakwah. Mereka melakukan *tabligh* keliling tanpa membawa nama organisasi Persis ke daerah-daerah yang berbasis pengaruh PKI (Anas, 2015).

Selanjutnya, kiprah sosial-politik Persis pada periode Orde Baru ditunjukkan dengan sikap akomodatif terhadap kepemimpinan Soeharto. Persis menyambut baik atas kebijakan politik Soeharto yang berusaha merehabilitasi Masyumi, yang dilakukan dengan membentuk Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) pada 7 April 1967. Sebagai indikasi atas didirikannya Parmusi sebagai kelanjutan Masyumi, Pemerintah Orde Baru sendiri menyetujui partai tersebut dipimpin oleh para mantan pemimpin Masyumi (Boland, 1985). Namun tidak lama kemudian, Persis menegaskan arah perjuangannya sebagai organisasi non-politik. Perhatian Persis selanjutnya lebih diarahkan ke-

pada usaha-usaha merespons masalah-masalah sosial, khususnya berkaitan dengan aliran-aliran yang dipandang menyesatkan umat Islam. Persis selalu memberikan pembahasan dan sorotan terhadap aliran dan gerakan Isa Bugis, Islam Jama'ah, Darul Hadits, dan Inkarus Sunnah (Anas, 2015).

Perkembangan sosial-politik Persis pada era Reformasi, secara garis besar dapat dilihat dari sikap dan kebijakan organisasi ini. Misalnya berkaitan dengan kepartaian, musyawarah Pusat Pimpinan Persis pada tanggal 22 Juli 1998 memutuskan antara lain: "Persis tetap istiqomah tidak akan menjadi partai politik dan tidak akan mendirikan partai politik". Meskipun demikian, keterlibatan perseorangan anggota Persis dalam keanggotaan atau kepengurusan partai politik tetap disetujui atau diakui sebagai hak dan sikap politik yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, ketika Partai Bulan Bintang (PBB) berdiri yang dianggap sebagai representasi Masyumi, maka Persis memberikan apresiasi atas kelahiran partai ini, sekalipun Persis secara organisatoris dan struktural tidak berusaha langsung menempatkan kader anggotanya dalam partai tersebut.

Adapun perkembangan sosial Persis pada era Reformasi ditunjukkan dengan peningkatan jumlah anggota organisasi serta pengembangan struktur organisasi ke luar wilayah Jawa Barat. Pada tahun 1995 anggota Persis yang ber-NPA (Nomor Pokok Anggota) tercatat sebanyak 10.604 orang. Kemudian sejak awal pertengahan tahun 2000 jumlah anggota mengalami peningkatan, sehingga keanggotaan Persis hingga kini tercatat sebanyak 23.245 orang. Jumlah ini bisa terhitung lebih banyak lagi bila ditambah anggota organisasi otonom: Persistri, Pemuda Persis, Pemudi Persis, Himpunan Mahasiswa

dan Himpunan Mahasiswa Persis, yang seluruh anggotanya berjumlah sekitar 5000 orang. Pengorganisasian Persis secara struktural meliputi: Perwakilan Pimpinan Pusat Persis dalam tiga koordinasi di DKI Jakarta, Sumatera Bagian Utara, dan Bagian Timur Indonesia; 7 Pimpinan Wilayah, 30 Pimpinan Daerah, dan 230 Pimpinan Cabang, ditambah satu cabang Persis di Singapura.

KONTRIBUSI SOSIAL-PENDIDIKAN

Persis semenjak awal berdirinya lebih menonjolkan identitas perjuangannya dalam bidang pendidikan dan dakwah. Pembentukan lembaga pendidikan telah dilakukan oleh tokoh-tokoh Persis sejak sebelum kemerdekaan Indonesia melalui lembaga pendidikan formal. Pada tahun 1930, Persis mendirikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar (HIS), kemudian sekolah MULO pada tahun 1931, dan sebuah Sekolah Guru pada tahun 1932. Semua jenjang pendidikan ini diselenggarakan di kota Bandung, sedangkan di kota lain seperti Garut dan Tasikmalaya dibangun sekolah-sekolah HIS Persis sejak tahun 1938 (Federspiel, 1970).

Selain pendidikan umum tersebut di atas, Persis menyelenggarakan pendidikan khusus keagamaan melalui lembaga pesantren. Pada tahun 1935, didirikan "Pesantren Persatuan Islam" di Bandung di bawah asuhan Hasan Hamid dan E. Abdurrahman. Pesantren ini diselenggarakan dalam dua jenjang pendidikan: *Pesantren Kecil*, yang diperlukan untuk pendidikan anak-anak dengan pelaksanaannya pada sore hari; dan *Pesantren Besar* yang dipersiapkan untuk pendidikan remaja, yang didirikan atas prakarsa A. Hassan pada bulan Maret 1936 (*Risalah*, 1962). Setelah A. Hassan pindah ke Bangil Jawa Timur pada bulan Maret 1940, *Pesantren Be-*



“

... peranan para tokoh Persis yang selalu gigih berjuang menegakkan prinsip serta ideologi Islam untuk kehidupan politik dan negara, dilakukan dalam penyampaian ide-ide politik Islam sebagai antitesa terhadap pemikiran-pemikiran nasionalis sekuler.

sar dikembangkan di sana, dan didirikan Pesantren Besar Khusus Puteri pada bulan Februari 1941. Pesantren ini bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan kepada kader putri Persis (Mughni, 1980; Djaya, 1980). Kedua pesantren tersebut menjadi wahana pendidikan kader serta perjuangan Persis di tengah situasi sosial-politik yang tidak kondusif akibat pendudukan Jepang maupun perang kemerdekaan dan situasi politik di awal kemerdekaan Indonesia.

Upaya peningkatan pendidikan pesantren Persis terus dilakukan oleh E. Abdurrahman dan Abdullah, yaitu dengan menambah tingkat Tsanawiyah pada tahun 1950. Dalam jenjang pendidikan menengah ini diberikan pelajaran agama dan umum, yaitu dengan pembagian 60% pelajaran agama Islam dan 40% pelajaran umum. Untuk mata pelajaran keagamaan meliputi : Hadits dan Ilmu Hadits (*Musthalahul Hadits, Rijalul Hadits, dan Riwayat Hadits*), Ilmu Hukum (*Ushul al-Fiqh dan Fiqh*), dan Bahasa Arab (*Nahwu Sharaf, Balaghah, Bayan, Badi, dan Ma'any*). Buku-buku pelajaran yang dipergunakan dalam pelajaran agama tersebut adalah sebagian besar berbahasa Indonesia, terutama karya-karya A. Hassan, sedangkan sebagian kecil lainnya adalah buku-buku berbahasa Arab. Adapun pelajaran umum yang diberikan pada jenjang Tsanawiyah ini meliputi: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Aritmetika, Geografi, Psikologi, Ilmu Kesehatan, dan Ilmu Pendidikan (Anas, 2015).

Pembangunan semua sarana pesantren dapat dilaksanakan atas biaya yang didapatkan dari hasil usaha Persis khususnya melalui pimpinan bagian pendidikan, sumbangan dari anggota Persis dan para dermawan (*Risalah*, 1962). Pendidikan Persis terus dikem-

bangkan melalui pesantren, bahkan guru dan mubalig lulusannya berperan mengembangkan pesantren dan dakwah di daerah-daerah di kemudian hari. Pada tahun 1963, Pesantren Persis tercatat sebanyak 20 pesantren yang tersebar di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah, dengan jumlah siswa sebanyak 6000 orang. Semenjak itu Persis juga menyelenggarakan beberapa pendidikan khusus untuk guru dan mubalig, disamping membina dua jenis pesantren besar yang berada di Bangil (Federspiel, 1970). Pendidikan Persis di masa-masa selanjutnya mengalami perkembangan yang pesat, sehingga hingga tahun 1980 Pesantren Persis telah tercatat mencapai jumlahnya sebanyak 78 pesantren yang tersebar di berbagai daerah (Mulyanudin 1991).

Bahkan hingga akhir masa Orde Baru, seperti dilaporkan pada Muktarar 11 di Jakarta tahun 1995, Persis telah memiliki sebanyak 436 pesantren dan lembaga pendidikan dalam berbagai tingkatan, dengan rincian jumlahnya sebagai berikut : 48 unit tingkat Raudhatul Athfal (Taman Kanak-Kanak), 285 unit tingkat Diniyah Ula/Ibtidaiyah, 50 unit Tajhiziyah, 32 unit Tsanawiyah/Diniyah Wustha, 19 unit Muallimin/Aliyah, dan 4 unit tingkat *Al-Jami'ah* (Perguruan Tinggi). Jenjang pendidikan tinggi dimaksud adalah: Sekolah Tinggi Agama Islam Persatuan Islam (STAIP), Program Diploma Dua Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA) yang bernaung di bawah STAIP, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Persis, dan Lembaga Tinggi Pendidikan Bahasa Arab (Anas, 2015). Adapun pengembangan kegiatan Persis di bidang sosial lainnya dilengkapi dengan pembentukan badan-badan pelayanan sosial dan keagamaan.

Akhirnya, artikel ini berkesimpulan dua hal tentang kontribusi Persis untuk bangsa dan negara sebagai berikut: Pertama, peranan para tokoh Persis yang selalu gigih berjuang menegakkan prinsip serta ideologi Islam untuk kehidupan politik dan negara, dilakukan dalam penyampaian ide-ide politik Islam sebagai antitesa terhadap pemikiran-pemikiran nasionalis sekuler. Penyaluran ideologi Islam dikembangkan Persis melalui partai Masyumi pada periode Orde Lama. Dalam hal ini, Persis cenderung mengembangkan kiprahnya yang bersifat *kritis-antagonistik*. Tetapi kecenderungan tersebut berubah pada masa Orde Baru dan masa-masa selanjutnya, Persis tidak secara langsung menunjukkan afiliasi politik terhadap partai tertentu, kecuali secara aspiratif mendukung Parmusi dan partai bernaaskan Islam seperti PPP, sebagaimana juga kiprah politiknya pada era reformasi yang independen. Karena itu, sosial-politik Persis lebih bersifat *kritis-akomodatif*. Adapun kontribusi kedua, merupakan prioritas peranan Persis bagi bangsa adalah pengembangan pendidikan dan dakwah yang terpusat dalam sistem pesantren. Di dalam sistem pesantren ini dikembangkan sekolah-sekolah keagamaan secara formal, juga ditambah dengan sekolah-sekolah Persis yang dikembangkan dengan memadukan pelajaran agama dan pelajaran umum. Sangat jelas, bahwa gerakan pendidikan Persis memberikan kontribusi kepada pembentukan ulama, cendekiawan muslim, mubalig, dan guru agama. Berarti Persis telah berjasa dalam pembentukan karakter bangsa dengan pola *reformasi-keagamaan* dan *modernisasi-pendidikan*. Semoga Persis terus berkembang-maju dengan ciri gerakannya tersebut di masa mendatang. ■